

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo dalam Hermawan (2016, hlm. 21) partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich dalam Ramlan (2016 hlm. 401) menjelaskan bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil yang mempunyai tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Kemudian, lanjut Roger Henry Soltau dalam Ramlan juga memberikan pandangannya tentang pengertian dari partai politik. Menurutnya, partai politik adalah perkumpulan dari sedikit banyaknya manusia yang terorganisir dan mereka bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.

Lalu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, dijelaskan tentang apa arti dari partai politik yaitu sekelompok warga negara yang mempunyai kepentingan bersama untuk membela kepentingan kehidupan warga negara. Lalu Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi.

Carl J. Friedrich dalam Ramlan (2016 hlm. 402) mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil kepada anggotanya”. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah “suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan.

Dari beberapa definisi para ahli dan undang-undang di atas, inti dari terbentuknya partai politik adalah merangkul orang-orang yang memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kekuasaan untuk merebut suatu kekuasaan politik di negaranya dan kemudian orang-orang tersebut memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan negara maupun masyarakat yang ada di dalam negara tersebut.

b. Fungsi Partai Politik

Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, menurut Miriam Budiardjo dalam Rahman (2021 hlm. 22) menjelaskan beberapa poin dari fungsi partai antara lain:

1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai

politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

2) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan

pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.

c. Tujuan Partai Politik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Partai Politik memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c) dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

2. Teori Kaderisasi

Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan (Fattah, 2017 hlm. 54-56). Dalam definisinya menurut kamus ilmiah populer, kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estapet dari suatu partai atau organisasi. Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi.

Kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. Dalam hal ini dapat kita lihat perbedaan dari kaderisasi dan rekrutmen itu sendiri. Menurut Tead dalam Kartono (2021 hlm. 51), kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi. Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini lebih mengacu pada sebuah proses untuk mengerakan sekumpulan orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan.

Sedangkan pengertian rekrutmen menurut Ivancevich dalam Ryan (2017, hlm 117) rekrutmen adalah sekumpulan kegiatan organisasi yang digunakan untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Cholisin, rekrutmen dalam rekrutmen politik misalnya merupakan sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Ryan, 2017 hlm.117)

Berdasarkan pengertian di atas, rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Namun dalam kenyataannya, implementasi antara kaderisasi dan rekrutmen masih rancu dalam perpolitikan nasional, dimana masih banyak partai yang sulit membedakan antara keduanya.

Dalam proses kaderisasi, terdapat dua macam prosesnya, yaitu: kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Hal ini dilihat dari kehidupan kanak-kanak hingga remaja dan dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Menurut Rivai dalam Ryan (2013 hlm. 87) dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria atau indikator yang memperlihatkan kelebihanannya, yaitu:

- a. Berkepribadian positif
- b. Gigih
- c. Mempunyai loyalitas
- d. Mempunyai dedikasi terhadap organisasi
- e. Memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan YME sebagai penentu yang mutlak.

Kaderisasi formal, kaderisasi lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Sehingga dengan adanya kaderisasi, peningkatan kualitas kepemimpinan ini akan memberikan hal yang positif dalam menciptakan pemimpin baru bagi organisasi. Kaderisasi sebagai tempat untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki kualitas untuk menjalankan organisasi agar dapat terus maju dan berkembang.

Pada dasarnya, pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis. Hal tersebut diilustrasikan sebagai berikut: kader merupakan hasil dari pengkaderisasian yang diperoleh karena adanya rekrutmen politik. Kader di dalam suatu parpol menentukan daya jual partai politik di masyarakat. Jika pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi baik akan menghasilkan kader yang berkualitas dan berkapabilitas pula,

begitu pun sebaliknya. Dihasilkannya kader- kader yang berkualitas dan berkapabilitas tentu akan menyorot partai politik asal kader tersebut muncul. Jadi, kualitas kader-kader yang ada dalam partai politik sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi partai tersebut.

3. Teori Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Menurut Irham Fahmi (2013 hlm. 15) Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia.

Konsep kepemimpinan merupakan komponen fundamental di dalam menganalisis proses dan dinamika di dalam organisasi. Untuk itu banyak kajian dan diskusi yang membahas definisi kepemimpinan yang justru membingungkan. Menurut Katz dan Kahn dalam Sugus (2018 hlm. 3) berbagai definisi kepemimpinan pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yakni “sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan, sebagai karakteristik seseorang, dan sebagai kategori perilaku”.

Pengertian kepemimpinan sebagai atribut atau kelengkapan suatu kedudukan, diantaranya dikemukakan oleh Janda dalam Sugus (2018 hlm. 3) sebagai berikut.

“Leadership is a particular type of power relationship characterized by a group member’s perception that another group member has the right to prescribe behavior patterns for the former regarding his activity as a group member”. (Kepemimpinan adalah jenis khusus hubungan kekuasaan yang ditentukan oleh anggapan para anggota kelompok bahwa seorang dari anggota kelompok itu memiliki kekuasaan untuk menentukan pola perilaku terkait dengan aktivitasnya sebagai anggota kelompok, pen.).

Selanjutnya contoh pengertian kepemimpinan sebagai karakteristik seseorang, terutama dikaitkan dengan sebutan pemimpin, seperti dikemukakan oleh Gibson dkk dalam bahwa *“Leaders are agents of*

change, persons whose act affect other people more than other people's acts affect them”, atau pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari orang lain mempengaruhi dirinya.

Adapun contoh pengertian kepemimpinan sebagai perilaku dikemukakan oleh Sweeney dan McFarlin dalam Sugus (2018 hlm. 4) yakni: *“Leadership involves a set of interpersonal influence processes. The processes are aimed at motivating sub-ordinates, creating a vision for the future, and developing strategies for achieving goals”*, yang dapat diartikan bahwa kepemimpinan melibatkan seperangkat proses pengaruh antar orang. Proses tersebut bertujuan memotivasi bawahan, menciptakan visi masa depan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan ketiga kategori pengertian di atas, Watkins dalam Sugus (2018 hlm. 4) mengemukakan bahwa “kepemimpinan berkaitan dengan anggota yang memiliki kekhasan dari suatu kelompok yang dapat dibedakan secara positif dari anggota lainnya baik dalam perilaku, karakteristik pribadi, pemikiran, atau struktur kelompok”. Pengertian ini tampak berusaha memadukan ketiga kategori pemikiran secara komprehensif karena dalam definisi kepemimpinan tersebut tercakup karakteristik pribadi, perilaku, dan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. Berdasarkan pengertian tersebut maka teori kepemimpinan pada dasarnya merupakan kajian tentang individu yang memiliki karakteristik fisik, mental, dan kedudukan yang dipandang lebih daripada individu lain dalam suatu kelompok sehingga individu yang bersangkutan dapat mempengaruhi individu lain dalam kelompok tersebut untuk bertindak ke arah pencapaian suatu tujuan.

Dalam hal kepemimpinan, peningkatan kualitas sangat diperlukan demi menjaga kelangsungan sebuah organisasi. Peningkatan kualitas kepemimpinan harus dilakukan sebagai usaha pengembangan kemampuan dalam memecahkan masalah, melalui proses mengikut sertakan atau meningkatkan peran serta orang-orang yang dipimpin.

Dengan kata lain memberdayakan anggota dalam suatu organisasi yang dipimpin. Usaha-usaha tersebut diantaranya:

- 1) Berpikir Efektif dalam Menetapkan Keputusan. Berfikir merupakan potensi psikis yang sangat istimewa, yang kualitasnya pada manusia jauh melampaui kemampuan berfikir yang diberikan Tuhan yang maha esa pada hewan, sebagai mahluk ciptaan-Nya yang sama-sama penghuni bumi.
- 2) Mengkomunikasikan Hasil Berpikir. Hasil berfikir seseorang yang cemerlang tidak ada artinya jika tidak dinyatakan dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebagai seorang pemimpin, hasil berfikir tersebut perlu diungkapkan ke publik agar dapat menggerakkan organisasi.
- 3) Meningkatkan Partisipasi dalam Memecahkan Masalah. Kemampuan membina kerjasama berarti mampu mendorong dan memanfaatkan parsipasi anggota organisasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya partisipasi dalam suatu organisasi maka pemecahan masalah dalam organisasi dapat terpecahkan.
- 4) Menggali dan Meningkatkan Kreativitas. Proses menggali dan meningkatkan kreativitas anggota organisasi dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menilai kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan.

b. Ciri – Ciri Kemepmimpinan

Untuk mewujudkan seseorang menjadi pemimpin yang ideal dibutuhkan syarat - syarat yang tergambarakan dalam bentuk ciri - ciri yang dimiliki. Adapun ciri - ciri untuk menjadi seorang pemimpin diantaranya:

- 1) Memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Artinya kompetensi yang dimiliki sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakar khususnya.

- 2) Memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut.
- 3) Mampu menerapkan konsep "*The Right Man and The Right Place*" secara tepat dan baik. Seorang pemimpin harus mampu menempatkan karyawannya sesuai dengan tempatnya dan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai mengatakan bahwa ciri - ciri pemimpin diantaranya:

- 1) Rasa Percaya Diri

Rasa percaya diri berhubungan secara positif dengan efektivitas dan kemajuan diri sendiri.

- 2) Integritas

Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

- 3) Berorientasi pada Keberhasilan

Orientasi terhadap keberhasilan termasuk sejumlah sikap yang saling berhubungan, nilai-nilai serta kebutuhan - kebutuhan akan keberhasilan, keinginan untuk unggul, dorongan untuk berhasil, kesediaan untuk memikul tanggung jawab dan perhatian terhadap sasaran tugas.

- 4) Keterampilan teknis dan konseptual

Keterampilan ini adalah pengetahuan mengenai metode-metode, proses-proses, prosedur serta teknik-teknik untuk melakukan kegiatan khusus dari unit organisasi serta menguasai kemampuan secara konseptual seperti analitis, berpikiran logis dan mempunyai konsep tertentu yang berguna bagi perusahaan maupun organisasi.

c. Fungsi Kepemimpinan

Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif pula. Untuk itu pemimpin harus betul-

betul menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin tutur Suwanto (2019 hlm. 219).

Klasifikasi fungsi-fungsi organik manajemen terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, *motivating*, *controlling*, dan *evaluating*. Berikut ini adalah penjelasan fungsi kepemimpinan dari beberapa ahli, yaitu:

1) *Planning*

Perencanaan (*planning*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses dan penentuan secara matang daripada hal - hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

2) *Organizing*

Pengorganisasian (*organizing*) adalah keseluruhan proses pengelompokan orang - orang, alat - alat, tugas - tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

3) *Actuating*

Penggerakan (*actuating*) adalah segala tindakan untuk menggerakkan orang - orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian yang telah ada.

4) *Motivating*

Memotivasi (*motivating*) adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan kerja.

5) *Controlling*

Pengendalian (*controlling*) adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan rencana – rencana yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan dapat terselenggara.

6) *Evaluating*

Penilaian (*evaluating*) adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

d. Azas-Azas Kepemimpinan

- 1) Kemanusiaan Mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu pembimbingan”manusia oleh manusia, untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya setiap individu, demi tujuan-tujuan human.
- 2) Efisien Efisiensi teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya”sumber-sumber, materi dan jumlah manusia; atas prinsip”penghematan, adanya nilai-nilai ekonomis, serta asas-asas manajemen modern.
- 3) Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata, menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi.

Teori kepemimpinan juga membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Kepemimpinan tidak lagi dipahami secara organik tetapi merupakan dimensi organisasi yang mempunyai kontribusi untuk membangun budaya organisasi yang sehat.

e. Indikator – Indikator Kepemimpinan

Adapun indikator-indikator kepemimpinan menurut (Hasibuan, 2015 hlm.170) yaitu:

- 1) Kemampuan analisis, yaitu pimpinan mampu menganalisa dalam menentukan langkah-langkah pencapaian tujuan.
- 2) Keteladanan, yaitu pimpinan hendaknya mampu memberikan contoh atau teladan dengan kesederhanaan terhadap para pegawai agar tidak terlalu royal
- 3) Rasionalitas dan objektivitas, yaitu pimpinan dalam menentukan tujuan haruslah bersifat rasional dan dala menilai para bawahannya hendak bersifat objektif.

- 4) Instruksi kerja, yaitu pimpinan dalam menyusun langkah-langkah dalam proses pencapaian tujuan harus terprogram, tersusun dan terkonsep.
- 5) Kemampuan mendengar saran, pimpinan yang demokratis harus mau mendengarkan bawahannya agar terhindar dari sifat otoriter.
- 6) Ketrampilan berkomunikasi, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam penyampaian perintah kepada karyawan.
- 7) Pembagian tugas, yaitu pimpinan harus bias beradaptasi dengan lingkungannya agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam pembagian tugas.
- 8) Ketegasan dalam bertindak, yaitu pimpinan dalam pengambilan keputusan harus bersikap tegas tanpa kompromi agar disegani oleh bawahannya.

B. PKN Sebagai Pendidikan Politik

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dari pembentukan warga negara yang baik. Sejalan dengan asumsi ini, Somantri dalam HemaFitria dkk (2015, hlm. 5) mendefinisikan Pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai: Pendidikan Kewarganegaraan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jika ditinjau dari tujuannya, Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan dari sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris,

pengembangan karakter dan sikap mental tertentu dan komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional.

Zamroni dalam Hemafitria dkk (2015, hlm. 6) berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman kesadaran kepada generasi baru. Demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan siswa dibekali orientasi sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dari pembentukan warga negara yang baik.

Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah mata pelajaran yang berbasis keilmuan, sebab benar-benar bersandar pada disiplin-disiplin keilmuan, dengan demikian terbebas dari pengaruh kekuasaan. Disiplin keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah kewarganegaraan dan hukum, selain itu disiplin ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan filsafat politik merupakan komponen utama dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Tujuan umum dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*). Mempertegas tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, Wahab dan Sapriya dalam Hemafitria dkk (2015, hlm. 7), mengidentifikasi bahwa: Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya (*socially sensitive, socially responsible, dan socially intelligence*), memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas dan perilaku

warga negara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behavior and desirable personal qualities*).

Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terdapat dua tipe pengajaran politik yaitu PKn (*civic education*) dan indoktrinasi politik. Untuk membedakan antara kedua tipe itu, bahwa PKn atau latihan kewarganegaraan (*civic training*) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya, dan yang dimaksud dengan indoktrinasi politik lebih memperhatikan belajar ideologi politik tertentu yang dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjastifikasi rezim tertentu.

PKn sebagai pendidikan politik merupakan salah satu bentuk sosialisasi politik telah memiliki teori yang sangat kuat dan jelas. Dikatakan kuat, sampai dewasa ini tampak belum ada bantahan bahwa PKn (*Civic Education/Citizenship Education*) menganut sistem teori tertentu, bahkan diperkuat lagi dengan teori pemberdayaan warga negara (*citizen empowerment*) melalui pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dalam rangka mengembangkan masyarakat kewargaan (*civil society*). Untuk kepentingan civil society juga telah dikembangkan teori/pendekatan politik kewarganegaraan (*citizenship politics*). Politik kewarganegaraan (*Citizenship politics*) memandang warga negara sebagai pusat dan aktor utama baik dalam wacana maupun praksis politik dan pembangunan. Pendekatan struktural prosesual, melihat proses politik (demokrasi) dalam konteks sosio-historis yang melekat serta menyentuh hubungan negara dan masyarakat. Kemudian masuknya demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (termasuk dalam hukum), hendaknya dipahami bahwa demokrasi politik sebagai demokrasi primer sebagai basis bagi pengembangan demokrasi ekonomi dan sosial. Dan berkembangnya demokrasi sekunder ini (demokrasi ekonomi dan sosial) juga akan sangat menentukan bagi pengembangan demokrasi.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan informasi dasar rujukan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan referensi yang penulis baca, ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan yang peneliti lakukan, Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Moch. Ridho Hartoni, 2021 “ Pola Kaderisasi Partai Politik Di Provinsi Lampung (Studi Pada Partai PERINDO dan Partai BERKARYA). Dengan hasil penelitian sebagai berikut: pada fakta yang terjadi di lapangan, kedua partai cenderung melakukan perekrutan instan, tanpa memberikan pendidikan politik terlebih dahulu kepada calon kader. Meskipun menganut prinsip non- diskriminatif, pada kenyataannya, partai lebih dahulu merekrut calon dengan melihat latar belakang profil dari calon kader, dan hubungan kekerabatan calon kader dengan kader lainnya. Padahal, Kualitas kaderisasi pada dasarnya mempengaruhi kualitas kader yang disiapkan oleh partai, baik untuk mengisi jabatan kepengurusan di internal partai maupun dalam rangka mengisi jabatan publik di luar partai, di lembaga lembaga legislatif dan eksekutif, di tingkat nasional dan daerah.
2. Insan Harapan Harahap, 2017 “Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional”. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: partai politik tak bisa lagi diandalkan sebagai 8 sumber rekrutmen kepemimpinan nasional karena dalam menjalankan peran dan fungsinya seperti rekrutmen politik dan proses kaderisasi, partai politik tidak mampu melakukannya secara konsisten, berjenjang, dan terstruktur. Lemahnya partai politik dalam merekrut kepemimpinan bukanlah satu dari sekian kesalahan partai politik dalam menciptakan kader-kader dan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, melainkan ada juga sistem kepartaian, regulasi, sistem pemilu, dan bahkan rezim yang berkuasa saat itu yang juga turut serta menyumbang lemahnya peran dan fungsi parpol yang sesungguhnya.
3. Joko Susanto, 2016 “Peran Kaderisasi Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik (Studi kasus Terhadap DPC Partai GERINDRA di Kota

Bandung). Dengan hasil penelitian sebagai berikut : (1) Proses kaderisasi yang dijalankan DPC Partai Gerindra Kota Bandung yaitu DPC hanya mengikuti intruksi DPP yang sudah dijalankan pengkaderan lewat pendidikan di hambalang dalam artian proses kaderisasi Partai Gerindra masih menganut sistem sentralisasi. DPC juga melakukan Kaderisasi dan pelatihan, kegiatanyapun dihadiri oleh pengurus DPC, PAC, Ranting dan sayap partai. Sehingga para kader di DPC Kota Bandung akan memiliki pengetahuan dan wawasan pendidikan politik yang luas, maka dari itu Elektabilitas partai Gerindra akan naik bilamana mempunyai kader yang berkualitas. (2) Kendala kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Bandung yaitu masih banyak anggota belum sepenuhnya aktif dalam kegiatan partai sehingga terkesan hanya menumpang nama dan sekedar mendapatkan kartu tanda anggota lalu berdampak pada kinerja Partai Gerindra secara keseluruhan. Dan dari SDM dari segi Intelektualitas dalam artian kurang pengetahuan tentang pendidikan politik dan wawasan kebangsaan (3) Upaya DPC Partai Gerindra Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas kadernya agar sesuai dengan harapan masyarakat yaitu dengan cara mengadakan suatu program yang bersentuhan dengan masyarakat contohnya program pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

4. Sutri Destemi Elsi dan Hartat, 2019 “Pola Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Golongan Karya Terhadap Perempuan Di Kota Jambi”. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Rekrutmen Politik merupakan proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi organisasi massa yang melibatkan golongan- golongan tertentu seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Dalam hal proses rekrutmen ini Partai Golkar tidak terlalu sulit untuk merekrut kader, dan didalam proses rekrutmen ini tidak ada paksaan sedikit pun. Proses Rekrutmen yang dilakukan partai Golkar juga terbuka dan tidak membedakan.
5. Yuni Vamelia, 2017 “Pola pengkaderan partai kebangkitan bangsa dalam meningkatkan kualitas berpolitik (studi pada DPC Partai Kebangkitan

Bangsa Kota Bandar Lampung)”. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Bentuk Pengkaderan masyarakat yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandar Lampung antara lain adalah Workshop, pendidikan kilat (diklat), seminar, dialog, kampanye pengenalan partai. Bentuk pengkaderan masyarakat yang dilakukan oleh partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan fungsinya sebagai partai politik dan sejalan dengan undang-undang yang mengamanahkan. Tetapi pengkaderan masyarakat tersebut masih membutuhkan penyempunaan dan membutuhkan perbaikan dimasa yang akan datang karena pengkaderan yang diberikan masih bersifat formalitas saja. Faktor pendukung dan penghambat Pengkaderan yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah kepengurusan yang solid dan sistem pengkaderan menjadi faktor pendukung terlaksananya pengkaderan diantaranya adalah adanya kepentingan, sikap apatis serta tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penghambat dalam kegiatan melakukan pengkaderan

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari permasalahan yang ada yaitu peran Kaderisasi partai politik terhadap kepemimpinan di Jawa barat. Berangkat dari judul peneliti yang akan di teliti oleh penulis maka dapat menyimpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kerangka Pemikiran

